

PERGESERAN MAKNA SOSIAL MAHKOTA BINOKASIH PADA PENGANTIN KEBESARAN SUMEDANG 1970-2010

Sofi Solihah

Institut Teknologi Bandung
sofisolihah1@gmail.com

Ruly Darmawan

Institut Teknologi Bandung
ruly.darmawan@gmail.com

Abstrak

Tata rias merupakan sentuhan keindahan yang tampak pada penampilan keseluruhan pengantin. Tata rias juga memiliki fungsi memperindah atribut pengantin khususnya pada saat perhelatan pernikahan. Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang memiliki ciri khas yang spesifik, yakni digunakannya mahkota sebagai perlengkapan perhiasan. Mahkota tersebut dikenal dengan Mahkota Binoka Sri atau Binokasih untuk mempelai laki-laki dan Mahkota Binokasri untuk mempelai wanita. Oleh karena proses Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang mengalami perjalanan sejarah maka penelitian ini bertujuan menguraikan perubahan sosial yang diidentifikasi melalui penggunaan Mahkota Binokasih. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode sejarah sebagai cara menguraikan proses. Metode sejarah terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni antropologi budaya untuk menganalisis bagaimana cara berpikir manusia sehingga tercipta budaya berbeda sehingga dapat mengubah tradisi sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada setiap perhelatan Pengantin Kebesaran Sumedang memiliki identitas kesejarahan yang terjaga sejak abad ke-16 melalui mahkotanya. Selain itu, penelitian ini menunjukkan keturunan menak Sumedang mengalami pergeseran ras kebangsawanan dari menak dengan menak menjadi menak dengan bukan menak. Hal tersebut nampak pada perhelatan pernikahan tradisional sejak 1970 hingga 2010.

Kata kunci: Binokasih, menak, pengantin, kebesaran, Sumedang

Abstract

Makeup is a touch of beauty that shows in the overall appearance of the bride and groom. Makeup also has function to beautify the attributes of the bride and groom, especially at wedding. Sumedang Greatness Bridal Makeup has specific characteristic, namely the use of crown as jewelry equipment. The crown is known as Mahkota Binoka Sri or Binokasih for the bridegroom and Mahkota Binokasri for the bride. Because the process of Sumedang Greatness Bridal Makeup has historical journey, this study aims to describe the social changes identified through

the use of the Mahkota Binokasih. The research methodology used is qualitative with historical methods as a way of describing the process. The historical method consists of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The research approach used is cultural anthropology to analyze how humans think so that different cultures are created so that they can change previous traditions. The results of this study indicate that each event of the bride and groom Sumedang has historical identity that has been preserved since the 16th century through its crown. In addition, this study shows that Sumedang's descendants experienced shift in the aristocratic race from menak with menak to being menak with ordinary society. All of these can be seen in traditional wedding events from 1970 to 2010.

Keywords: Binokasih, menak, bridal, greatness, Sumedang

I. PENDAHULUAN

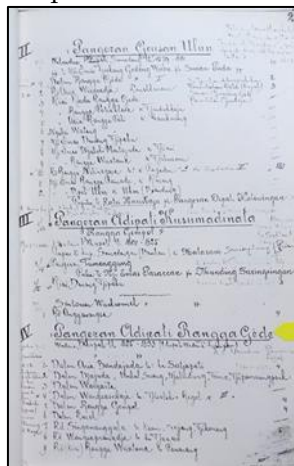
Tata rias yang digunakan pada perhelatan pernikahan memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai olesan untuk memperindah penampilan. Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang merupakan tata rias pengantin khusus untuk para bangsawan keturunan Pangeran Menak Sumedang. Perjalanan sejarah Kabupaten Sumedang dapat ditelusuri bertepatan dengan runtuhnya Kerajaan Pajajaran pada abad ke-16. Pada masa itu, kekuasaan Pajajaran menjadi terpecah. Kerajaan Sumedanglarang dapat bertahan karena pada abad ke-16, sebagian besar rakyatnya sudah memeluk Islam di bawah kekuasaan Pangeran Kusumahdinata yang memerintah tahun 1530-1578 (Ibu Nonoy, 83 tahun. Ahli Silsilah Museum Prabu Geusan Ulun. *Wawancara*, Sumedang, 1 Desember 2020)

Menurut Lubis (1998: 34-36) Kerajaan Sumedanglarang mencapai puncak kekuasaannya saat dipimpin oleh Pangeran Angka Widjaja. Pada masa pemerintahan Pangeran Angka Widjaja, Mahkota Binokasih diserahkan oleh Sri Baduga Maharaja agar Kerajaan Sumedanglarang menjadi penerus Kerajaan Pajajaran. Sejak saat itu tahun 1578, Mahkota Binokasih menjadi simbol penobatan raja Sumedanglarang dengan gelar Prabu Geusan Ulun (1579-1601). Mahkota Binokasih selanjutnya digunakan sebagai identitas kebangsawanan keturunan Kerajaan Sumedanglarang secara turun-temurun hingga sekarang. Mahkota Binokasih digunakan pada acara pernikahan bagi para keturunan menak Sumedang. Oleh karena itu, Mahkota Binokasih dan Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang tidak dapat terpisahkan.

Terdapat berbagai lambang, makna, dan simbol yang digunakan dalam Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang. Menurut Unajah (2006: 33) sebelum era 1900-an suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh para menak Sumedang berbeda dengan sekarang. Ada masa di mana kedua calon mempelai untuk mendapatkan pasangannya dijodohkan oleh kedua orangtua sehingga belum mengenal calon pasangan masing-masing. Para putra dan putri menak tersebut pada umumnya taat pada aturan kebangsawanan tersebut sehingga patuh sampai menerima jodoh atau pasangan yang dipilih oleh orangtua masing-masing. Tentu pilihan pasangan tersebut memiliki pertimbangan khusus sebagai kriteria yang menjadi syarat, dilihat dari:

1. Bibit, artinya asal usul keturunan dari orang tua kedua belah pihak masih memiliki status sosial Menak atau bangsawan, sehingga trah menak atau darah biru masih tetap dapat dipertahankan selanjutnya dilihat segi kesehatan jasmani dan rohani
2. Bobot dilihat kualitas tingkat pendidikan, perilaku keseharian, penerapan agama budi pekerti etika sopan santun dan sosialisasi dalam masyarakat pada umumnya sehingga watak dan sikap tingkah laku orang tua akan sangat kuat pengaruhnya pada generasi penerus.
3. Bebet, artinya dinilai berdasarkan kekuatan materi kekayaan kedua orang tua. Kedua belah pihak mempertimbangkan keseimbangan harta, setelah setuju dengan pilihan orang tua maka diadakan penyelidikan atau penelitian pada calon istri dengan mempertimbangkan pada bibit bebet bobot dan lain-lain. Apabila semua hasil penelitian baik dan disetujui oleh semua pihak keluarga, diadakan kunjungan ke tempat wanita untuk melaksanakan rangkaian upacara pernikahan.

Ketiga hak tersebut menjadi syarat agar terjaga sistem kekerabatan antar keluarga keturunan Kerajaan Sumedanglarang. Cara menjaga hubungan kebangsawanan tersebut ada pada sejumlah syarat yang harus ditempuh calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Pertama, calon mempelai harus memberikan bukti berupa salinan buku silsilah Kerajaan Sumedanglarang. Calon mempelai tergantung pada siapa yang merupakan keturunan Kerajaan Sumedanglarang. Bisa salah satu pihak atau kedua calon pengantin.



Gambar 1. Silsilah Keturunan Kerajaan Sumedanglarang.
Sumber: Dokumentasi Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang

Setelah bukti silsilah dipenuhi, calon pengantin datang ke Museum Prabu Geusan Ulun untuk mengisi formulir pernyataan. Kemudian dari pihak museum, yang memiliki ahli silsilah akan menelusuri dan mencocokkan apakah bukti silsilah sesuai dengan arsip resmi museum. Apabila sesuai, maka antara calon pengantin dan pihak museum akan menentukan proses penyerahan mahkota dari awal acara pernikahan hingga selesai. Proses tersebut sudah termasuk penyerahan identitas kebangsawanan lain seperti pakaian dan alas kaki.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, rumusan masalah yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara Mahkota Binokasih dengan pengantin Kebesaran Sumedang?
2. Bagaimana pergeseran sosial terjadi di kalangan bangsawan Sumedang?
3. Apa saja dampak dari pergeseran makna sosial terhadap penggunaan Mahkota Binokasih?

Penelitian ini akan terfokus pada pembahasan mengenai penggunaan Mahkota Binokasih dengan pengantin Kebesaran Sumedang, yakni:

- a. Periode yang dijelaskan dibatasi pada tahun 1970an hingga 2010an.
- b. Membatasi secara spasial lingkup penelitian, yakni di Kabupaten Sumedang dengan melakukan wawancara mendalam kepada pihak keluarga keturunan bangsawan Sumedang.
- c. Data-data yang dikumpulkan berupa dokumentasi foto yang berlatar pernikahan sehingga didapat kegiatan pada kehidupan riil sehari-hari.

II. LANDASAN TEORI

Penelitian ini merupakan riset mengenai desain, sejarah, dan budaya sehingga proses penelitian menggunakan beragam teori juga perspektif dari disiplin ilmu lain. Perspektif disiplin ilmu yang digunakan adalah sejarah dan kajian budaya. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan sejumlah informasi bukan berbentuk angka.

Metode Penelitian juga memuat metode dan teknik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sumber data. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pertama, heuristik atau tahap mencari dan mengumpulkan sumber dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan proses yang dilakukan penulis, pengumpulan data dimulai dari mencari sumber literatur. Peneliti membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian ini dari buku, artikel, majalah, dan sumber tertulis dari internet.

Tahap kedua, yaitu kritik, ketika sumber ditemukan melalui tahapan heuristik maka harus diuji dahulu dengan kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern meliputi masalah otentisitas sumber, kritik intern meliputi masalah kredibilitas, yaitu masalah dapat tidaknya dipercaya sumber itu (Herlina, 2008: 94), kritik intern ini digunakan untuk menekankan kembali bahwa sumber yang ditemukan paling dekat dengan apa yang benar-benar terjadi sehingga fakta dapat dijelaskan berdasarkan perolehan data di lapangan, selanjutnya dinyatakan kredibel setelah melalui kritik ekstern dan kritik intern (Gottschalk, 2008: 112-113).

Tahap ketiga adalah Interpretasi, penulisan sejarah lebih merupakan masalah interpretasi atau penafsiran masa lampau daripada usaha menghidupkan kembali atau menciptakannya. Berbagai fakta yang lepas satu dari lainnya dengan melalui interpretasi oleh peneliti satukan hingga menjadi kesatuan cerita yang harmonis dan masuk akal. (Herlina, 2008:99). Pada pelaksanaan interpretasi ini peneliti dihadapkan pada analisis atau menguraikan karena terkadang sebuah sumber menghasilkan beberapa kemungkinan sehingga untuk menghasilkan fakta dibutuhkan sintesis atau menyatukan data. Dengan demikian, proses berpikir

antara analisis dan sintesis dapat menghasilkan hal yang mendekati fakta (Kuntowijoyo, 2013:78-80).

Terakhir yaitu Historiografi, pada tahapan ini penulis menyusun hasil interpretasi fakta-fakta menjadi suatu kisah sejarah yang selaras. Dalam menuliskan kisah ini hendaknya seorang penulis menggunakan bahasa yang baik sehingga hasil tulisan mudah dimengerti Herlina, 2008:100).

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi budaya sebagai alat analisis untuk membedah pola perilaku manusia. Perhatian terhadap pendekatan ini ditujukan pada sifat khusus manusia seperti cara produksi tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup satu berbeda dari pergaulan hidup lainnya. Fokus studi ini ada pada antropologi budaya atau mempelajari manusia dari mulai identifikasi tingkah laku hingga cara berpikir. Antropologi kebudayaan pada umumnya menyelidiki bagaimana manusia mampu berkembang sehingga mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman. Ini menunjukkan manusia dengan akal dan struktur fisik berhasil mengubah lingkungan yang bukan ditentukan oleh pola naluri semata melainkan juga pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya. Antropologi budaya ini memberikan gambaran bahwa kebudayaan merupakan suatu hal yang sangat esensial pada diri manusia.

Peneliti juga mencari studi yang pernah dilakukan sebelumnya dari tesis dan disertasi yang peneliti dapatkan dari berbagai perpustakaan. Di antaranya Perpustakaan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, Unit Pelayanan Terpadu Perpustakaan Pusat Institut Teknologi Bandung, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Perpustakaan CISRAL (*Center of Information and Scientific Resource and Library*) Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Ayip Rosidi, Perpustakaan Salman Corner, dan Dispusipda (Dinas Perpustakaan Daerah) Kota Bandung.

Setelah pencarian sumber literatur, penulis melakukan wawancara yang menjadi cara pengumpulan data rujukan primer. Data yang didapat berasal dari para pihak yang dianggap ahli di bidang kebudayaan, misalnya di Museum Prabu Geusan Ulun terdapat ahli silsilah dan ahli siger. Mengingat penelitian ini menguraikan kegiatan yang berhubungan dengan sejarah perjalanan manusia. Peneliti melakukan wawancara mendalam sdiscourse analisis terseruktur pada saat pencarian data di lapangan.

Wawancara mendalam secara terstruktur (*structured interview*) digunakan peneliti saat memperoleh informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat menentukan pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Wawancara berstruktur dapat terlaksana apabila peneliti melakukan sejumlah persiapan. Berkaitan dengan penelitian akademik maka beberapa narasumber memberikan syarat berupa surat izin wawancara dari instansi. Dibutuhkan ketelitian serta ketekunan peneliti untuk mengurus sejumlah syarat administrasi resmi. Menjadi peneliti membuat individu memiliki tanggung jawab akademik saat mengakses dokumen resmi organisasi dan museum. Peneliti membuat daftar pertanyaan agar informasi tidak terlewat.

Pada saat pelaksanaan wawancara, peneliti juga meminta kesediaan narasumber untuk menunjukkan alat dan bahan riasan pengantin kebesaran Sumedang. Mengidentifikasi elemen apa yang khusus diaplikasikan agar membentuk riasan khas kebesaran Sumedang. Informasi spesifik bisa didapatkan juga bila peneliti aktif

menggal lebih rinci sehingga mendapatkan pemahaman atas topik yang ditanyakan. Namun, ini harus dilakukan secara hati-hati mengingat data yang diakses berupa lembaran resmi museum. Sebagai catatan akhir setelah wawancara dilakukan, peneliti hendaknya mengukur kedalaman data yang diperoleh jika harus datang kembali di lain waktu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantin Kebesaran Sumedang memiliki ciri khas mahkota hingga kini. Identitas kebesaran Sumedang ada pada mahkota Binokasih dan Binokasri. Hal ini menjadikan keunikan tersendiri bila dibandingkan identitas pengantin daerah lain di Jawa Barat. Identitas Pengantin Kebesaran Sumedang dipertahankan melalui berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut ada pada proses verifikasi seorang calon pengantin keturunan Kerajaan Sumedanglarang. Proses verifikasi dilakukan oleh pihak Museum Prabu Geusan Ulun yang juga generasi penerus Kerajaan Sumedanglarang. Sehubungan dengan itu, para generasi keturunan Kerajaan Sumedanglarang mempertahankan identitas tersebut dengan berbagai cara, salah satunya menjaga keutuhan mahkota di Museum Prabu Geusan Ulun serta memberikan syarat khusus sebelum calon pengantin mengenakan mahkota.

Berkaitan dengan pemakaian Mahkota Binokasih sebagai identitas menak Sumedang. Memasuki tahun 1970an, terdapat pergeseran nilai kebangsawanan terlihat dari dokumentasi pernikahan Kebesaran Sumedang. Pergeseran tersebut tampak dari siapa penggunanya, yakni antara bangsawan dan bukan bangsawan.



Gambar 2. Pengantin Kebesaran Sumedang Tahun 1970
Sumber: Dokumentasi Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang

Memasuki tahun 1970an, penggunaan Mahkota Binokasih yang otentik mulai digantikan oleh replika. Hal ini dilakukan oleh pihak museum untuk menjaga keutuhan bentuk dari elemen-elemen mahkota yang sepenuhnya terbuat dari emas. Adapun dari segi nilai kebangsawanan, calon pengantin Kebesaran Sumedang tidak lagi diwajibkan harus kedua mempelai. Artinya, apabila salah satu pihak yang merupakan keturunan menak tidak menjadi masalah dan perhelatan tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan Mahkota Binokasih. Berikut merupakan deskripsi lebih detail Mahkota Binokasih:

Bagian dalam berlapis hitam. Bagian utama dari mahkota adalah kuluk yang menutupi bagian kepala sampai dahi. Pada sebelah kiri-kanan kuluk atau

bagian pelipis, terdapat ron berupa hiasan tumpal yang tersusun tiga. Pada bagian kuluk belakang dihiasi oleh helai-helai daun dan Garuda Mungkur. Pada bagian ron terdapat lima buah hiasan yang berbentuk lebah dengan filosofi kehidupan rumah tangga kedua mempelai dapat semanis lebah madu. Pada bagian kiri-kanan di bawah ron terdapat lima untai biji ketimun, yakni lambang dari jumlah hari (Unajah: 2006: 53).

Dapat ditarik pemahaman bahwa tata rias pengantin Kebesaran Sumedang memiliki identitas makna yang berfokus pada mempelai pria, berkaitan dengan jejak kesejarahan bahwa Mahkota Binokasih menjadi simbol penyerahan kepemimpinan Kerajaan Sunda Pajajaran kepada Kerajaan Sumedanglarang.



Gambar 3. Pengantin Kebesaran Sumedang Tahun 1980an
Sumber: Dokumentasi Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang

Pada tahun 1980 riasan pengantin Kebesaran Sumedang tidak mengalami perubahan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 1970an. Pengantin masih mengikuti pergeseran nilai kebangsawanan karena pada foto di atas, yang merupakan keturunan menak Sumedang adalah mempelai pria.



Gambar 4. Pengantin Kebesaran Sumedang Tahun 1990an
Sumber: Dokumentasi Keluarga Asri Rosalina

Pada perhelatan pernikahan Kebesaran Sumedang 1990an, terlihat bahwa mempelai wanita merupakan keturunan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan untuk menentukan pasangan pada pernikahan Sunda telah berubah. Kebijakan dibuat untuk membuat perilaku orang banyak menjadi terpola sesuai pola budaya yang

berlaku. Dengan model pemikitan seperti ini maka kebijakan merupakan sebuah produk kultural. Sementara perancangan, proses, dan pelaksanaannya adalah proses kultural. Pada saat ketiga aktivitas tersebut, terjadi lagi proses perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan khusus (Wiranata, 2011: 16).



Gambar 5. Pengantin Kebesaran Sumedang Tahun 2000an
Sumber: Dokumentasi Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang

Gambar kelima menunjukkan bahwa mempelai pria merupakan suku di luar Sunda, tepatnya keturunan Belanda. Terdapat sedikit perbedaan antara gambar keempat dan kelima. Apabila gambar keempat menunjukkan pengantin perempuan masih memiliki keturunan Indonesia, maka gambar kelima dari pihak mempelai pria merupakan warga negara yang berasal dari negara luar sepenuhnya (bukan keturunan campuran).



Gambar 6. Pengantin Kebesaran Sumedang Tahun 2010an
Sumber: Dokumentasi Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang

Pada gambar terakhir ini, mempelai pria merupakan warga negara asing (Perancis) yang menikah dengan keturunan menak Sumedang. Sampai saat ini, pernikahan antara warga keturunan asing masih berlangsung karena telah terjadi perubahan peraturan dari lingkungan internal keturunan Kerajaan Sumedanglarang. Hal ini menjadi suatu proses pernikahan yang sudah dianggap biasa. Seiring dengan

per kembangan zaman, pada internal keluarga Kerajaan Sumedanglarang sudah mengadakan pertemuan membahas mengenai pernikahan dengan warga negara asing tersebut. Pernikahan antarbangsa menjadi fenomena yang biasa terjadi pada masyarakat setelah masa kontemporer.

Apabila diperhatikan kembali, mulai tahun 1970-an, pengantin Kebesaran Sumedang mengalami perubahan garis keturunan. Banyak di antara pengantin Kebesaran Sumedang, salah satu dari pengantinnya bukan keturunan Kerajaan Sumedanglarang. Meski demikian, pemakaian atribut lain seperti pakaian tidak mengalami perubahan meski pemakainya bukan dari kalangan bangsawan.

Berdasarkan semua foto tahun 1970 hingga 2010, pakaian Pengantin Kebesaran Sumedanglarang berwarna kuning. Pada bagian atasnya menggunakan potongan pendek. Kemudian dilapisi kain bludru hitam dengan hiasan sulam benang keemasan yang menutupi torso. Pada bagian bawah, pengantin mengenakan kain batik wiru bercorak lereng.

Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang mengalami pergeseran sosial apabila dilihat dari perubahan pemakai atribut kebangsawanan. Saat ini baik Mahkota Binokasi maupun busana pengantin merupakan imitasi. Meskipun atribut asli masih disimpan di Museum Prabu Geusan Ulun, Sumedang. Sebenarnya, replika baju kebesaran mempelai pria dan wanita hanya boleh dipakai oleh mereka yang masih memiliki keturunan raja Sumedang. Namun, saat ini berdasarkan keputusan bersama dari internal keluarga kerajaan, atribut pengantin boleh digunakan oleh pihak di luar bangsawan. Identifikasi mengenai pergeseran tatanan sosial kehidupan bangsawan Sunda akan dijelaskan kemudian berkaitan dengan identitas simbol yang memberikan eksplanasi pentingnya peran kebangsawanan dan analisis mengenai sistem kekerabatan dalam masyarakat Sunda.

Kemampuan mengidentifikasi memiliki makna penting karena permasalahan dalam menjejaki identitas dan jati diri melalui penanaman sejarah akan muncul setidaknya melalui dua kondisi. Pertama, keterbatasan atau bahkan ketiadaan catatan sejarah tentang komunitas-komunitas khususnya dalam bentuk sumber tertulis. Kedua terjadinya pemudaran atau hilangnya kesadaran sejarah di tengah komunitas. Bila dua kondisi tersebut terjadi bukanlah barang mudah untuk bisa membangun identitas bagi sebuah komunitas. Kalaupun ada, bisa jadi kekuatan integratif komunitas tersebut tidak akan kokoh. Besar kemungkinan mudah digoyahkan bila komunitas tidak memiliki kemampuan identifikasi yang kuat. Berpijak pada alur berpikir seperti itu jelas pengenalan mengenai sejarah Sunda bagi komunitas yang bernama etnis Sunda tidak lagi merupakan suatu kondisi untuk bisa mengenal dengan baik identitas dan jati diri orang Sunda. Selanjutnya, agar pengenalan tersebut dapat memiliki nilai guna maka realita perjalanan orang Sunda harus dipahami makna di dalamnya. Makna untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Lebih dari itu melalui pengenalan dan pemaknaan sejarah Sunda diharapkan dapat membangun sebuah kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan diri sepanjang perjalanan sejarah (Dienaputra, 2011).

1. Pergeseran Nilai Bangsawan Sunda di Priangan

Pergeseran nilai kebangsawanan ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pergeseran terjadi sejak masa kedatangan Belanda ke Nusantara pada abad ke-16. Kedua, saat masa invasi Kerajaan Mataram ke wilayah Tatar Ukar. Nama Tatar Ukar merujuk pada wilayah Sunda yang saat ini sebagian besarnya merupakan Provinsi Jawa Barat.

Kepemimpinan seorang bupati muncul pertama kali sejak masa invasi Kerajaan Mataram ke wilayah Tatar Ukar. Wilayah Priangan, sebagai salah satu Kabupaten yang dibentuk Pemerintah Kerajaan Mataram, dan berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut, maka sistem pemerintahan Priangan memiliki sistem pemerintahan Mataram. Bupati memiliki berbagai jenis simbol kebesaran, pengawal khusus dan prajurit bersenjata. Simbol dan atribut itu menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh Bupati atas rakyatnya. Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati, antara lain ditunjukkan oleh pemilikan hak-hak istimewa yang biasa dimiliki oleh raja.

Meski demikian, pengawasan langsung dari penguasa Mataram amat terbatas, sehingga waktu itu para Bupati di Priangan umumnya berkuasa seperti raja. Bupati berkuasa penuh atas rakyat dan daerahnya. Sistem pemerintahan dan gaya hidup bupati merupakan miniatur dari kehidupan keraton. Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh pejabat-pejabat bawahannya, seperti patih, jaksa, penghulu, demang atau kepala cutak (kepala distrik), camat (pembantu kepala distrik), patinggi (lurah atau kepala desa) dan lain-lain.

Wilayah Priangan berada dibawah pengaruh Mataram sampai akhir tahun 1677. Kemudian Kabupaten Bandung jatuh ke tangan Kompeni. Hal itu terjadi akibat perjanjian Mataram - Kompeni (perjanjian pertama) tanggal 19-20 Oktober 1677. Di bawah kekuasaan Kompeni (1677-1799), Bupati di Priangan tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di kabupaten, tanpa ikatan birokrasi dengan Belanda. Sistem pemerintahan kabupaten pada dasarnya tidak mengalami perubahan dengan tatanan sosial pada kerajaan, karena Belanda hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan Belanda, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC. Kekuasaan bupati mulai mengalami pergeseran ketika memasuki abad ke-20 seiring dengan terjadinya pergolakan sosial politik di lingkungan pemerintahan (Lubis, 2015: 18-19).

Salah satu kewajiban utama Bupati terhadap kompeni adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman tertentu, terutama kopi, dan menyerahkan hasilnya. Sistem penanaman wajib itu disebut Preangerstelsel. Sementara itu bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya. Bupati juga tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan Bupati yang ditunjuk oleh Belanda atau penguasa Kompeni di Cirebon. Bupati dapat melaksanakan kewajiban sebagai perwakilan pemerintah Belanda sehingga pengaruh bupati dalam bidang keagamaan di tengah masyarakat dapat fokus melaksanakan tugasnya. Termasuk mengelola penghasilan dari bidang terkait keagamaan, seperti bagian zakat fitrah, tidak diganggu baik bupati maupun rakyat, dalam hal ini petani kopi, mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh pemerintah Belanda.

Melalui fakta ini dapat dipahami mengapa kemudian kedudukan bangsawan Sunda mulai bergeser. Awalnya, bupati merupakan keturunan langsung kerajaan-

kerjaan di masa lampau. Menjelang kedatangan Belanda, posisi bupati yang tadinya menempati posisi teratas dalam tata sosial masyarakat menjadi bergeser berada di bawah pemerintahan Belanda.

Memasuki abad ke-20, pemerintah Belanda melalui *Staatsblad* tahun 1925 Nomor 378 tanggal 14 Agustus menetapkan Jawa Barat sebagai sebuah nama wilayah administratif. Selanjutnya, Belanda membuat sistem perubahan pemerintahan dengan membentuk *gewest* (wilayah administratif) yang dibagi lagi atas wilayah karesidenan. Saat dibentuk tahun 1926, Jawa Barat terbagi atas lima karesidenan, delapan belas kabupaten, dan enam kotapraja, yakni:

1. Karesidenan Banten, terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak
2. Karesidenan Batavia, terdiri atas Kabupaten Batavia, Kabupaten Meester Cornelis, Kabupaten Karawang, Kotapraja Batavia, dan Kotapraja Meester Cornelis
3. Karesidenan Buitenzorg, terdiri atas Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kotapraja Buitenzorg, dan Kotapraja Sukabumi
4. Karesidenan Priangan, terdiri atas Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kotapraja Bandung
5. Karesidenan Cirebon, terdiri atas Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kotapraja Cirebon.

Dari kelima karesidenan tersebut, Kabupaten Sumedang termasuk ke dalam Karesidenan Priangan. Istilah Priangan saat ini masih digunakan untuk menunjukkan wilayah Bandung, Sumedang, dan sekitarnya. Adanya pemerintahan Belanda, membuat kekuasaan bangsawan menjadi terbagi lagi. Penyebutan identitas bangsawan Sunda berkembang menjadi menak, santana, dan cacah yang menunjukkan perbedaan strata kebangsawanan.

Istilah *ménak* sudah merupakan salah satu kosa kata yang sangat populer bagi masyarakat Sunda, untuk menunjukkan satu lapisan masyarakat yang berdasarkan hukum (saat itu) memiliki berbagai hak yang istimewa. Di kalangan masyarakat luas kata *ménak* kemudian diartikan untuk mereka yang harus diladeni segala keperluannya (oleh orang lain) sehingga hidupnya menjadi enak. Bagi masyarakat kebanyakan, yang disebut *somah* atau *cacah*, perilaku, sikap serta bahasa untuk *ménak* pun ada tatacara serta aturannya yang khusus. Dalam bahasa (Sunda) ada yang disebut *undak-usuk* di mana bila *somah* berbicara kepada *ménak* harus menggunakan bahasa halus (*basa lemes*) sementara *ménak* ter-hadap *somah* cukup menggunakan bahasa kasar (*basa kasar*, *basa loma*) saja; sedang dalam perilaku ada yang disebut *unggah-ungguh* yang mencantumkan berbagai tatacara dalam bersikap (bagi kalangan *somah* terhadap *ménak*), di mana kalau tatacara itu dilanggar, yang bersangkutan akan disebut tidak tahu adat, dan *ménak* pun akan marah dibuatnya (Lubis: 1998:25)

Mengapa pergeseran dalam tatanan sosial bangsawan dapat terjadi? Karena perkembangan masyarakat pada interaksi yang hidup di antara wilayah berbeda, telah mengubah sifat singular menjadi plural (Piliang, 2020: 112). Pergeseran seperti ini dapat terjadi bila lembaga-lembaga kebudayaan, tidak lagi berperan sebagai pusat orientasi dari seluruh lembaga kebudayaan lainnya. Perubahan kebudayaan

dirasakan manfaat dan memberi keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Masyarakat yang menjadi pendukung perubahan kebudayaan lebih kuat, terutama mereka yang memegang kekuatan politik, dibanding dengan mereka yang menentang perubahan (Hidir, 2009: 50).

Perubahan dalam transformasi budaya juga dijelaskan oleh Dominic Strinati sebagai pertarungan budaya dan negosiasi berbagai kepentingan. Negosiasi ini dilakukan baik oleh kelompok dominan maupun individu. Bagaimana budaya dipengaruhi budaya kuat dan dominan direpresentasikan kepada masyarakat melalui cara yang penuh makna. Negosiasi budaya ini menjelaskan kondisi di mana individu dan kelompok membawa proses, pola pikir, serta cara berkreasi dari asal wilayahnya sehingga mempengaruhi mencapai tawaran yang lebih solutif dalam menentukan identitas bersama (Mayo, 2015: 23).

Negosiasi budaya melibatkan proses interaksi yang cukup rumit karena menggabungkan sejumlah elemen gaya yang mengintegrasikan ciri khas dari masing-masing perias seluruh Jawa Barat. Negosiasi dalam perubahan dalam pengantin Sunda dapat terlaksana dengan negosiasi dari kalangan bangsawan Sunda (keturunan menak), masyarakat sipil, dan negara hadir untuk memfasilitasi kebijakan budaya dalam pernikahan. Birokrasi negara, dalam pemahaman Gramsci diidentifikasi sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan, dan institusi pendidikan. Aktivitas negara tidak hanya sekedar melakukan tindakan dalam membangun konsensus melalui pendidikan dan fungsi kelembagaan.

2. Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Sunda Terhadap Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang

Selain analisis dari sudut pandang kebangsawanan, adanya perubahan sosial budaya dalam pengantin Sunda dapat dipahami melalui sudut pandang antropologis. Masyarakat Sunda menganut sistem kekerabatan bilateral, yaitu kekerabatan anggota keluarga baik pihak ayah maupun ibu memiliki kedudukan sama. Menurut (Marlina, 2006: 191), Wanita dalam pandangan masyarakat Sunda lama memang menduduki tempat terhormat. Meskipun tidak sampai menduduki tempat-tempat terpenting dalam ruang publik, kedudukan wanita amat terhormat dalam ruang domestik dan terlebih dalam pandangan orang Sunda.

Berdasarkan adat dan pandangan orang Sunda yang lebih kuat menghormati wanita (ibu) daripada pria (ayah). Timbul sikap menghormati wanita (ibu) itu tampak dari nama atau istilah beberapa panutan yang disebut *indung* (ibu) misalnya *indung beurang* (dukun beranak), *indung suku* (ibu jari), *indung pare* (padi yang paling dulu masak dan dituai). Termasuk pihak yang mendidik dan merawat anak bagi semua makhluk adalah *indung* (ibu). Artinya, simbol pendidik menunjuk pada wanita.

Apabila melihat tradisi lisan Sunda yang berupa ungkapan-ungkapan, maka kedudukan wanita Sunda itu bervariasi juga ada yang tinggi dan ada yang rendah, malah kebanyakan ungkapan yang mengharuskan wanita turut atau tunduk kepada suami seperti dalam ungkapan; *taraje nanggeuh*, *dulang tinande* (tangga bersandar, dulang siap menadah) mengandung makna wanita selalu bersedia untuk menjalankan kewajiban sebagai istri dalam setiap pasang-surut rumah tangga.

Inilah mengapa pada perhelatan pernikahan Kebesaran Sumedang, sebagian mempelai pria merupakan warga negara asing karena dalam pandangan masyarakat Sunda, baik wanita (ibu) maupun pria (ayah), saat menjalani kehidupan rumah tangga memiliki sistem kekerabatan yang sama. Meski terdapat pula dalam kehidupan rumah tangga, bahwa pria (ayah) sebagai pemimpin keluarga. Namun, wanita (ibu) juga memiliki kedudukan sama sebagai pendidik sehingga memiliki peran dalam proses tumbuh kembang dalam kehidupan rumah tangga.

Peranan wanita dapat dilihat dari dua segi: *pertama*, peranannya dalam keluarga dan rumah; wanita sebagai pendidik pertama dan utama mempunyai tugas menyiapkan manusia-manusia yang cerdas, sehat, terampil, kreatif, dinamik, produktif dan disiplin. Generasi yang akan datang bergantung harap kepada kemampuan wanita dalam mempersiapkan manusia pembangunan dewasa ini; dan *kedua*, peranan wanita di luar keluarga dan rumah atau peranannya di masyarakat.

Wanita dengan kepribadiannya yang cerdas, teliti, cermat, rajin, dan disiplin adalah suatu potensi yang tidak dapat diabaikan dalam memainkan peran di tengah keluarga. Peran wanita sehubungan dengan perkembangan generasi muda, berkaitan dengan fungsi semula jadi wanita dalam hal ini ibu sebagai pembimbing anak. Ibu lebih dapat diterima oleh anak muda sebagai penegak norma dan nilai kehidupan dalam keluarga. Hal tersebut berpengaruh pula dalam mengukuhkan norma kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian peran penting wanita dalam keluarga, terutama dalam fungsi keibuannya adalah untuk membina ketahanan keluarga (Komariah, 2019: 355-356).

IV. PENUTUP

Pergeseran dalam penggunaan atribut pernikahan Kebesaran Sumedang, memberikan penjelasan tentang peran manusia tetapi juga mampu memberikan peran keluarga, kerabat, suku bangsa, dan negara. Mengenai kesadaran tentang perjalanan hidup dikelompokkan itu yang akhirnya mampu memetakan identitas atau jati diri manusia secara individu maupun manusia sebagai suatu komunitas. Hal tersebut berpengaruh pada kehidupan kerabat masyarakat Sunda karena pernikahan merupakan momen sakral. Pada perhelatan pernikahan juga digunakan artefak budaya yang memiliki makna mendalam. Makna tersebut merepresentasikan identitas kebangsawanan Sumedang. Pemahaman mengenai identitas dan jati diri bagi individu merupakan terlebih sebuah komunitas memiliki makna penting karena permasalahan dalam menjejaki identitas dan jati diri.

Pada penelitian ini tentu terdapat sejumlah kekurangan sehingga diharapkan menjadi peluang pada penelitian selanjutnya, Sebagai saran untuk para peneliti selanjutnya peluang penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jejak kehidupan manusia yang tertuang dalam catatan-catatan sejarah, memiliki pengaruh besar dalam memberikan penjelasan tentang peran manusia. Catatan bersejarah juga mampu memberikan peran keluarga yang berdampak pada kebijakan publik sehingga kesadaran tentang perjalanan hidup di masa lalu mampu memetakan identitas atau jati diri manusia secara individu maupun manusia sebagai suatu komunitas.
2. Penemuan mengenai kekerabatan dalam masyarakat Sunda dan kaitannya dalam pernikahan adat Sunda memerlukan interpretasi dan pemahaman narasi

yang lebih komprehensif. Termasuk di dalamnya kebutuhan untuk mengidentifikasi objek-objek penelitian.

3. Perubahan tatanan sosial kebangsawanan Sunda menggambarkan kehidupan masa kerajaan hingga masuknya pemerintahan Hindia-Belanda perlu dikaji lebih jauh. Hal ini karena berkaitan erat dengan penggunaan siger sebagai simbol perhiasan wanita, perlu dikaji lebih jauh. Demikian halnya dengan Siger Sunda yang juga digunakan pada pernikahan Kebesaran Sumedang, penelitian mengenai Siger Sunda membutuhkan pemahaman secara historis agar dapat memberikan kontribusi keilmuan. Pada penelitian mengenai tata rias Kebesaran Sumedang ini, Siger Sunda harus digunakan bersama Mahkota Binokasih, bentuknya menyerupai Mahkota Batara Rama yang melambangkan keluhuran sebagaimana layaknya kedudukan seorang raja. Mahkota Binokasih memiliki pesan bahwa mempelai pria nantinya akan menjadi pemimpin rumah tangga sehingga hendaknya pemimpin rumah tangga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Batara Rama. Apabila tata rias di wilayah lain berpusat pada mahkota pengantin wanita, tata rias pengantin Kebesaran Sumedang.

Kontribusi melalui pengenalan dan pemaknaan sejarah Sunda diharapkan dapat membangun sebuah kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan diri sepanjang perjalanan sejarah.

Pentingnya kesadaran tersebut menempatkan manusia sebagai aktor sentral dalam kehidupan sosial budaya. Pemahaman ini dapat dikatakan menjadi pemahaman standar yang perlu dimiliki manakala berbicara tentang sejarah, budaya, dan desain.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Komariah, Siti. 2019. "Perubahan Peranan Wanita Sunda: Studi Kasus di Kota Bandung" dalam *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 2, No.2, hlm. 354-384.
- Marlina, Ietje. 2006. "Kedudukan Wanita Menak Dalam Struktur Masyarakat Sunda (Studi Kasus di Kota Bandung)" dalam *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 8, No.2, hlm. 184-204.

Buku

- Dienaputra, Reiza D. 2011. *Sunda. Sejarah, Budaya, dan Politik*. Sumedang: Sastra Unpad Press.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hidir, Achmad. 2009. *Antropologi Budaya Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya*. Riau: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Ihromi, T.O. 2016. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lubis, Nina H. 2008. *Metode Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mayo, Peter. 2015. *Hegemony and Education Under-Neoliberalism. Insight from Gramsci*. New York: Routledge.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- R.F. Ankersmit. 1987. *Refleksi tentang Sejarah. Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Unajah, Uun. 2006. *Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang*. Kegiatan Peningkatan Mutu Lembaga Kursus Subdis PLS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2006.

Wiranata, I Gede A.B. 2011. *Antropologi Budaya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sumber Lisan/Informan

Ibu Munaroh (52 tahun). 2020. Bagian Siger dan Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang Museum Prabu Geusan Ulun. *Wawancara*, Sumedang, 1 Desember 2020

Ibu Nonoy (83 tahun). 2020. Ahli Silsilah Museum Prabu Geusan Ulun. *Wawancara*, Sumedang, 1 Desember 2020.

Ibu Nurwati (39 tahun). 2020. Bagian Siger dan Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang Museum Prabu Geusan Ulun. *Wawancara*, Sumedang, 1 Desember 2020.

Teh Rani (23 tahun). 2020. Staf Museum Prabu Geusan Ulun. *Wawancara*, Sumedang, 28 November 2020.

Teh Neng (27 tahun). 2020. Staf Museum Prabu Geusan Ulun. *Wawancara*, Sumedang, 28 November 2020.